

- HUSLAMI
- PERUNDANG-UNDANGAN

SKRIPSI

ARFAN FAIZ MUHLIZI

UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT

ICIC
Tat. 213/98
Muh
u



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998

**UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI RAKYAT**

SKRIPSI

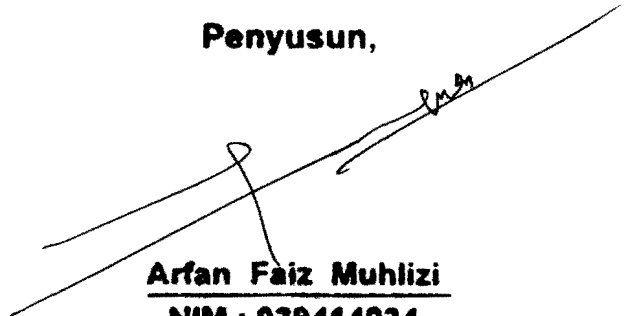
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Romlah Sartono, SH., MS
NIP : 130 359 289

Penyusun,



Arfan Faiz Muhlizi
NIM : 039414034

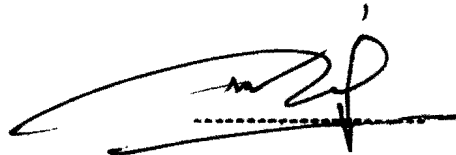
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada : 20 Juli 1998

Tim Penguji Skripsi :

KETUA :

Udin, SH



SEKRETARIS :

Sukardi, SH



ANGGOTA :

Hj. Romlah, SH., MS



Dr. Suwoto, SH., MS



Endang Sayekti, SH, M.HUM



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik oleh penulis dalam bab terakhir ini, yaitu;

Pertama, bahwa uji materiil yang diatur dalam hukum positif, tidak memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Hal ini disebabkan karena adanya kerancuan teoritis, maupun juridis, yaitu ketidakjelasan tentang peraturan mana yang harus diikuti dari beberapa peraturan yang ada, serta lembaga mana yang berwenang melakukan uji materiil tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan uji materiil ini menjadi tidak efektif.

Selain itu hal ini juga disebabkan karena dalam hukum positif, uji materiil hanya bisa dilakukan pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Yang berarti undang-undang tidak bisa diuji secara materiil. Ketika undang-undang tidak dapat diuji itu berarti negara kita telah bergeser dari *rechtsstaat* menjadi *machtsstaat*, karena undang-undang tersebut adalah produk penguasa, yang dengan begitu kebijakan-kebijakan yang dilakukannya bisa dilegalisasi dengan undang-undang yang dibuatnya.

Kedua, bahwa untuk itu perlu dijajaki upaya pengujian secara materiil terhadap undang-undang perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan adanya pengujian secara materiil terhadap undang-undang ini, maka akan bisa dikontrol kembali kebijakan penguasa yang dituangkan dalam undang-undang, apakah sesuai dengan *rechtsidee* yang tertuang dalam konstitusi kita.

Ketiga, bahwa yang berhak melakukan uji materiil sampai tingkat undang-undang adalah Mahkamah Agung secara aktif tanpa melalui proses litigasi, dan lembaga peradilan yang lain dalam proses litigasi, bukan seperti yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 1993, karena PERMA tersebut tidak bisa mengalahkan peraturan perundangan sebelumnya yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Selain itu juga karena Hanya Mahkamah Agunglah, lembaga judiciil yang mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga legislatif.

Uji materiil tanpa melalui proses litigasi ini hendaknya harus dilakukan secara aktif, tanpa menunggu adanya gugatan atau permohonan uji materiil. Karena di samping tidak ada kriteria siapa subyek yang punya kapasitas mengajukan gugatan atau permohonan uji materiil ini, juga karena memang kewajiban Mahkamah Agung untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan yang ada sebagai lembaga judiciil, yang akan menjaga konsistensi negara hukum yang dianut Indonesia dalam konstitusinya.

Keempat, tetapi uji materiil oleh Mahkamah Agung ini bisa memberikan perlindungan hukum bagi rakyat bukan dengan tanpa catatan, karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi Mahkamah Agung untuk bisa bersikap "merdeka" dalam melakukan uji materiil tersebut. Kendala tersebut adalah bahwa ternyata Kekuasaan Kehakiman dalam Mahkamah Agung pun masih belum bebas dari intervensi pemerintah.

2. SARAN

Untuk melakukan uji materiil sebagaimana yang disarankan oleh penulis dalam kesimpulan tersebut tampaknya masih memerlukan waktu yang agak lama, akan tetapi sebenarnya upaya perlindungan hukum bagi rakyat tersebut bisa dilakukan dalam proses litigasi dengan cara melakukan interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berpangkal pada *rechtsidee* sehingga memungkinkan perlindungan hukum bagi rakyat tersebut, dalam setiap kasus yang ditangani oleh pengadilan. Uji materiil dalam proses litigasi inilah yang saat ini harus dibudayakan, dengan berlandaskan bahwa hakim bukan semata-mata "corong" undang-undang.

Dengan begitu penulis di sini memberi saran agar para hakim, mulai peradilan tingkat pertama, aktif melakukan penggalian hukum, serta penemuan hukum dan tidak melulu menjadi corong dari undang-undang. Untuk itu perlu dibudayakan adanya putusan hakim yang tidak hanya

menggunakan penafsiran undang-undang secara harfiah, tetapi dengan penafsiran sistematis yang berpijak pada *rechtsidee*, sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya jurisprudensi-jurisprudensi, yang berpijak pada *rechtsidee*. Dengan cara demikian sebenarnya para hakim juga telah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan secara materiil.

Dengan demikian perlindungan hukum bagi rakyat tetap dapat dilakukan secepatnya dengan strategi yang demikian. Tetapi hal ini tentu saja nantinya tergantung dari mental para hakim yang ada di negara kita. Perlu dibentuk hakim-hakim yang berani menepis intervensi pemerintah maupun pihak-pihak lain, dan mempunyai kualitas penguasaan dan pemahaman peraturan perundang-undangan serta pemahaman tentang *rechtsidee* sebagai negara hukum. Pembentukan mental yang seperti inilah yang membutuhkan waktu yang lama.

Selain itu untuk menuju proses peradilan yang merdeka itu, penulis juga menyarankan agar Hakim Agung direkrut dari kalangan akademisi yang memiliki kapasitas tentang hukum ini, sehingga pemahamannya tentang hukum dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sedangkan perekrutan hakim-hakim dalam tingkat di bawahnya, harus dilakukan secara otonom oleh lingkungan peradilan dengan otoritas tertinggi di tangan Mahkamah Agung, bukan di tangan pemerintah seperti saat ini.

